



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD atau dengan kata lain. Rencana Strategis memuat arah kebijakan lintas sektor melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional, jadi Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan, sasaran dan prioritas sasaran.

Pembangunan transportasi selama ini telah mampu menghubungkan antar wilayah dalam satu untaian jaringan dan menjadikan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya sebagai urat nadi kehidupan bermasyarakat pada Kota Palangka Raya. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan ke depan sebagai akibat krisis multi dimensi yang pemulihannya dirasakan masih berjalan lambat. Dalam hal ini Rencana Strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) pada khususnya Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan kegiatan suatu SOPD yang sekaligus merupakan alat ukur untuk menilai atau mengevaluasi keberhasilan suatu pekerjaan pembangunan yang telah direncanakan dan dituangkan dalam dokumen rencana strategis tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Nomor Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Pengendalian Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Rencana Strategis dimulai dengan menyusun atau membentuk tim penyusunan Rencana Strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yaitu menyiapkan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah, kemudian setelah Tim terbentuk maka dilakukan orientasi kepada seluruh anggota tim untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, juga keterkaitan dengan perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen rencana strategis, menganalisis serta



mengimplementasi data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam penyusunan rencana strategis tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun agenda kerja tim Penyusunan rencana strategis sebagai panduan kerja.

Tahapan selanjutnya tim melakukan pengumpulan data dan informasi yang diantaranya dokumen rencana strategi SOPD, RPJMD Kota Palangka Raya dan Rencana Kerja SOPD periode sebelumnya dan dokumen-dokumen lainnya yang kemudian disusun baik dalam bentuk matrik daftar cek list maupun bentuk tabel yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Setelah data dan informasi serta dokumen lainnya yang dibutuhkan terkumpul maka diolah sedemikian rupa sesuai ketentuan yang berlaku seperti mengidentifikasi potensi maupun identifikasi permasalahan terutama tentang pendanaan juga mengevaluasi pencapaian yang telah dilaksanakan pada rencana strategis periode sebelumnya dan lain-lain.

## 1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya merupakan penjabaran atau bagian tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2013-2018 sesuai Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2013 yang dijadikan landasan operasional Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dalam melaksanakan kegiatannya dan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 yang mengatur tentang peranan dan tanggungjawab SKPD untuk menyiapkan rencana strategis, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan RPJMD dan Renstra SOPD, pokok-pokok isi Dokumen Renstra, Status hukum Renstra SOPD yang mana Rencana Strategis dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja. Sedangkan beberapa landasan hukum lainnya yang berkaitan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5025);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
16. Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;



17. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 139 Tahun 2016 Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas Melalui Pembatasan Operasional Kendaraan Bermotor dan Penutupan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Pada Masa Angkutan Lebaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 712);
24. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 tahun 2013 tentang Visi dan Misi Kota Palangka Raya;
25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya;
26. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2028;
27. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14 Kota Palangka Raya tahun 2009 tentang RPJMD Kota Palangka Raya;
28. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Kota Palangka Raya tahun 2014 tentang RPJMD Tahun 2013 - 2018 Kota Palangka Raya
29. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Kota Palangka Raya tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;



30. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya; (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
31. SPM Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya yaitu :
  - a. Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek;
  - b. Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - c. Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
32. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 53);
33. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 12);
34. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan & Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 2);
35. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/24/2007/050-/264a/sj TENTANG Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007;
36. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 249 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2014 – 2018
37. Renstra SKPD Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya adalah :

1. Untuk memberikan gambaran situasi dan kondisi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.
2. Sebagai panduan bagi seluruh jajaran organisasi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
3. Sebagai acuan untuk mewujudkan kinerja dalam melaksanakan tugas pada kurun waktu tertentu, yaitu 5 (lima ) tahun kedepan



4. Memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dengan berbagai kendala, tantangan dan peluang

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh jajaran organisasi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dalam pencapaian visi serta misinya dalam kurun waktu 2013-2018 dapat tercapai;
2. Diharapkan dapat memperbaiki kinerja (motivasi) seluruh jajaran organisasi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya;
3. Dapat dijadikan tolok ukur kinerja dan acuan serta pedoman bagi seluruh jajaran organisasi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya;
4. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun external;
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (Stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan;

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penulisan Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SOPD, fungsi Renstra SOPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SOPD, keterkaitan Renstra SOPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SOPD.Landasan Hukum

##### **1.2 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SOPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SOPD.

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SOPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SOPD, serta susunan garis besar isi dokumen.



## BAB II GAMBARAN PELAYANAN SOPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SOPD
- 2.2 Sumber Daya SOPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SOPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SOPD

## BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga dan Renstra
- 3.4 Telaahan Tencana Tata Ruang Wilayan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

## BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi SOPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SOPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan SOPD

## BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA , KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1 Rencana Program dan Kegiatan
- 5.2 Indikator Kinerja
- 5.3 Kelompok Sasaran
- 5.4 Pendanaan Indikatif

## BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

- 6.1 Indikator Kinerja SOPD





## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SOPD**

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan di bidang Perhubungan secara terpadu bersama instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Program kegiatan yang telah ditetapkan periode 5 tahun yang terdahulu dapat disimpulkan 75 % dapat terlaksana sesuai yang diharapkan sesuai dengan rencana strategis maupun RJMD Kota Palangka Raya. Adapun Gambaran kondisi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya selama 5 ( lima) Tahun kedepan melalui Renstra adalah sebagai berikut :

Urusan Perhubungan ;

1. Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji ( KBWU ) yang diuji mengalami peningkatan 1,5 % per tahun. Hal ini disebabkan karena Palangka Raya adalah Pusat kota Pendidikan, Pemerintahan dan Jasa sehingga mobil niaga /truk untuk usaha terbilang kecil dibanding mobil pribadi dikarenakan Kota Palangka Raya belum banyak memiliki Perkebunan Kelapa Sawit, Tambang dan industri.  
Untuk Uji KIR Angkutan Umum kondisi awal Jumlah Kendaraan yang telah Uji KIR sebanyak 12.256 KIR dan perkiraan target pada akhir Renstra 2013-2018 adalah 13.482 KIR dengan kenaikan 1 % Uji KIR per tahun dan pada akhir Renstra diharapkan mencapai target dengan kenaikan 5 % Uji KIR dengan dukungan penambahan kelengkapan alat uji PKB dengan pengujian KIR.
2. Jumlah Arus Angkutan Umum hanya mengalami peningkatan 2% per tahun dikarenakan lebih banyak penumpang yang lebih suka bepergian menggunakan travel baik resmi maupun tidak resmi dan sisanya menggunakan pesawat udara dan Kendaraan pribadi. Kondisi awal Jumlah Bus adalah 120/206 Bus dan 178/430 Angkot dan untuk Kondisi Akhir Renstra adalah 200/230 Bus dan 300/430 Angkot
2. Rasio ijin trayek selama 5 tahun tidak mengalami penurunan dan penambahan dikarenakan tidak ada jalur trayek baru.
3. Jumlah Pelabuhan Sungai berjumlah 16 , Kondisi awal Dermaga di Kota Palangka Raya adalah 2/16 dan Kondisi Akhir Renstra adalah 8/16 target 50% Dermaga sudah dilakukan Rehab/Pemeliharaan sehingga sarana prasarana terpelihara dan meningkatnya pelayanan Dermaga, diantaranya Dermaga Wisata bertambah dari kondisi 1/3 menjadi 4/5 seiring kenaikan akan kebutuhan masyarakat.





4. SDM Aparatur

Tersedianya SDM dengan kebutuhan fasilitas sesuai dengan bidang teknis yaitu 40/73 ASN dan Komputer 10 Unit dan Kondisi Akhir Renstra adalah 60/90 ASN dan komputer 40 Unit dengan peningkatan ini diharapkan terwujudnya aparatur yang siap pakai.

5. Prasarana Fasilitas Perhubungan

- Jumlah Terminal yang ada 2/4 Terminal dan pada kondisi akhir renstra adalah 4/4 Terminal dapat berfungsi dengan baik.
- Traffic Light yang berfungsi adalah 10/15 unit dan pada kondisi akhir adalah 18/20 unit berfungsi baik.
- Marka jalan 2/15 lokasi dan kondisi akhir adalah 8/20 lokasi dapat terpenuhi
- Rambu-rambu 30/150 rambu dan pada akhir renstra 90/150.

## 2.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi SOPD

### Tugas dan Fungsi (disertakan perda)

1. Tugas :

Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya mempunyai Tugas Pokok merumuskan kebijakan operasional dinas, mengendalikan, membina dan memberikan pelayanan teknis di bidang perhubungan. secara terpadu bersama instansi terkait, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Fungsi :

Dalam menyelenggarakan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan informasi dan administrasi perhubungan dengan instansi terkait, swasta, LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan teknis operasional di bidang perhubungan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Melaksanakan pemberian izin atau rekomendasi di bidang perhubungan.
- e. Merumuskan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan di bidang perhubungan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota.
- f. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal dalam lingkup tugasnya.



Pembentukan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya. yang juga menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 139 Tahun 2016 Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan. Yang mana Bagan Struktur Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tipe A pada Wilayah Geografis Kepulauan dengan Fokus Sub Urusan Sesuai dengan Moda transportasi yang Dilayani pada Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan & Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Palangka Raya. Dengan Struktur Organisasi terdiri dari :

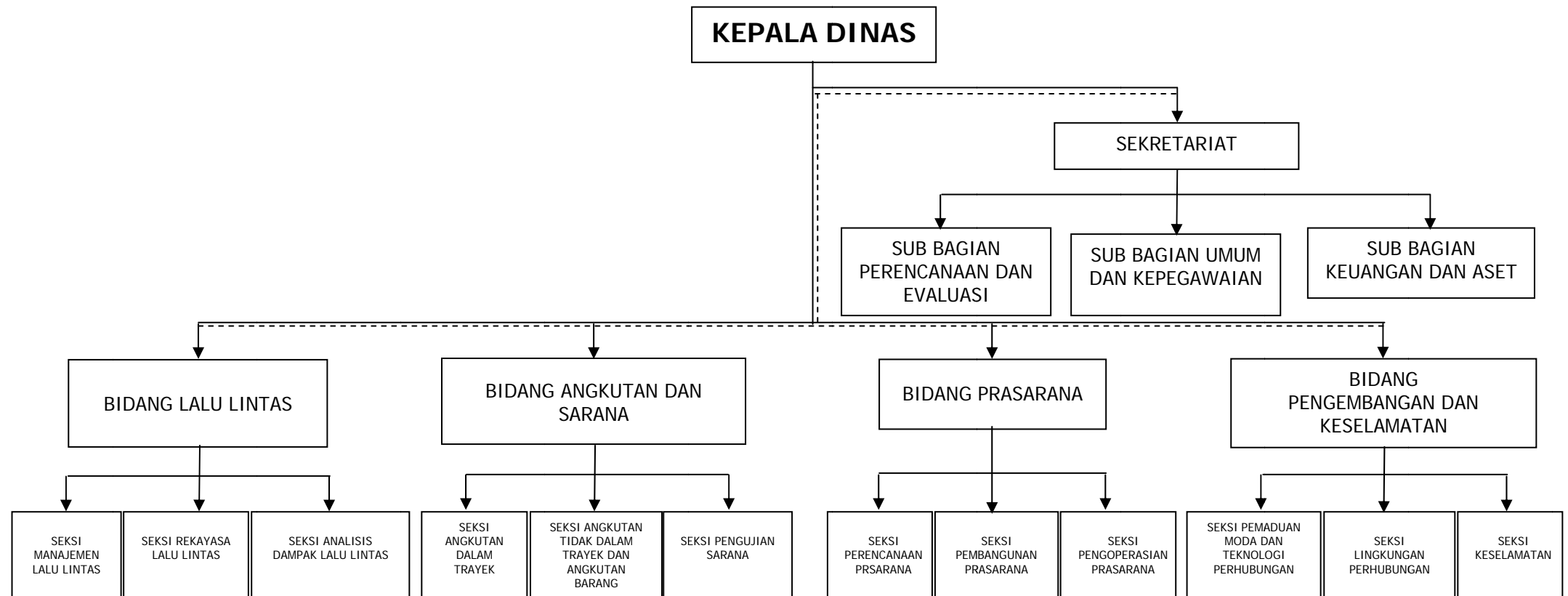
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan Dan Aset;
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
  1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
  2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
  3. Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas;
- d. Bidang Angkutan Dan Sarana, terdiri dari ;
  1. Seksi Angkutan Dalam Trayek;
  2. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek Dan Angkutan Barang;
  3. Seksi Pengujian Sarana;
- e. Bidang Prasarana, terdiri dari :
  1. Seksi Perencanaan Prasarana;
  2. Seksi Pembangunan Prasarana;
  3. Seksi Pengoperasian Prasarana;
- f. Bidang Pengembangan Dan Keselamatan, terdiri dari :
  1. Seksi Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan;
  2. Seksi Lingkungan Perhubungan;
  3. Seksi Keselamatan.



SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

- LAMPIRAN :
1. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM. 139 TAHUN 2016 PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
  2. PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
  3. PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN & SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA





2.2 Sumber Daya SKPD

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian depan bahwa Sumber Daya Aparatur pada Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya tahun 2017 berjumlah ..... orang ASN yang terdiri dari :

Tabel 2.1 Jumlah Sumber Daya Aparatur berdasar tingkat pendidikan dan jenis kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Magister ( S2)			
2	Sarjana ( S1)			
3	Diploma IV ( D-IV)			
4	Sarjana Muda D- III			
5	Diploma II (D-II)			
6	SMA			
7	SMP			
8	SD			
	Jumlah			

Tabel 2.2 Jumlah Sarana Prasarana Prioritas dalam Pelayanan Publik.

No	Sarana Prasarana	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Terminal Penumpang	Jumlah Terminal yang ada 2 baik dari 4 Terminal	dan pada kondisi akhir renstra adalah 4/4 Terminal (berfungsi dengan baik)
2	Traffic Light	Traffic Light yang berfungsi adalah 10/15 unit	18/20 unit berfungsi baik
3	Marka Jalan	2/15 lokasi (kondisi baik)	8/20 (kondisi baik)
4	Rambu-rambu	30/150 rambu	90/150

2.3 Kinerja Pelayanan SOPD

Reviu capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2008 - 2013 dan Proyeksi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2014 - 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :





Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

No.	Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja/ Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jumlah Angkutan Darat dibanding - Jumlah Penumpang	40/100	-NA-	-NA-	0,49	0,52	0,55	0,66	0,69	0,48	0,52	0,58	0,77	0,85	98	100	105	117	123
2	Jumlah Arus Angkutan Umum	100	-NA-	-NA-	696000	697000	698000	59164	59.250	668800	697000	699000	59164	59250	96	100	100	100	100
3	Rasio Ijin Trayek	0,187/430	-NA-	-NA-	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	100	100	100	100	100
4	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang di uji	4000	-NA-	-NA-	9085	11092	13080	9704	10.000	4960	12902	7703	10388	10400	55	116	59	107	104
5	Jumlah Dermaga/ Terminal	8/4	-NA-	-NA-	12/4	12/5	13/6	13/4	16/4	13/5	12/5	13/3	13/4	16/4	108	100	100	100	100



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SOPD

Dalam melaksanakan tugas di bidang Perhubungan kota Palangka Raya tentunya banyak memiliki tantangan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada, tetapi tantangan itu adalah kesempatan untuk melihat peluang yang ada, dibawah ini ada beberapa point tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya :

Tantangan selama ini yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya antara lain adalah :

1. Optimalisasi Terminal Mihing Manasa kondisi sebagai berikut:

NO	URAIAN	SPM	Rasio Capaian Dari Target Tahunannya				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Angkutan Darat Tersedia dibanding - Jumlah Penumpang	40/100	98%	100%	105%	117%	123%
2	Jumlah Arus Angkutan Umum	100%	96%	100%	100%	100%	100%

2. Peningkatan pelayanan prima di terminal, dermaga dan pelayanan perijinan LLAJ kondisi sebagai berikut:

NO	URAIAN	SPM	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji ( KBWU) yang di uji.	4000	55%	116%	59%	107%	104%

3. Sarana dan prasarana kendaraan operasional yang masih terbatas ;

No	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan Bus 3 Unit	Rusak Ringan
2	Kendaraan Mobil Operasional 6 Unit	Baik (1 Sesuai Operasional )
3	Speed boat 2 Unit	Rusak
4	Sepeda Motor 11 Unit	3 Kurang, 8 Baik
5	Komputer 10 Unit	Minimal 30 Unit

4. Manajemen data dan informasi yang masih belum memadai ;  
(Inventarisasi LLAJ,Sungai dan Danau, Parkir, Terminal Dengan hanya kelengkapan data sarana prasarana yang terpantau 15%)
5. Penertiban taxi liar ;
6. Penertiban parkir dalam masalah tarif parkir :

Dengan teratasinya permasalahan pada tantangan tersebut diatas tentunya akan berdampak kepada peningkatan PAD ( Pendapatan Asli Daerah ), sebab itu Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya melihat peluang yang ada untuk digali baik itu antara lain adalah :





1. Mengembangkan jaringan transportasi jalan yang diarahkan secara terpadu antara jalan raya, sungai, danau dan penyeberangan melalui pembangunan sarana dan prasarana dengan meningkatkan manajemen dan pelayanan serta pembinaan terhadap pengguna transportasi/ pengembangan SISTRANS ( Sistem Transportasi Nasional) bagi wilayah Kota Palangka Raya;
2. Meningkatkan Pelayanan ( PKB) Pengujian Kendaraan Bermotor;
3. Menyediakan Sarana Prasarana Kebutuhan ASN dalam pemenuhan Pelayanan Publik;
4. Menyediakan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat melalui pemanfaatan teknologi informasi;
5. Melakukan pendataan terhadap lokasi parkir yang belum berijin;
6. Melakukan melakukan law enforcement, Penertiban terhadap Angkutan Umum dan Angkutan Liar agar optimal mengurangi kepadatan lalu lintas, memudahkan aksesibilitas masyarakat dan agar mereka mau masuk terminal;



## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD

Berdasarkan Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya maka beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi diantaranya adalah sebagai berikut :

- Sumberdaya aparatur yang masih terbatas;
- Sarana dan prasarana operasional kendaraan operasional yang masih terbatas;
- Manajemen data, informasi yang belum memadai;
- Masih kurangnya rasa memiliki akan sarana dan prasarana perhubungan oleh masyarakat;
- Luasnya jangkauan wilayah pelayanan;
- Koordinasi lintas program masih belum memadai;
- Partisipasi/disiplin masyarakat dalam mematuhi aturan berlalu lintas masih kurang;
- Belum optimalnya pemanfaatan Terminal;
- Penertiban Taksi Liar dan Angkutan Umum Liar;

#### 3.2 Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

##### a. Visi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2013-2018 Visi Kota Palangka Raya adalah “ **Tewujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Falsafah Budaya Betang**”.

1. Kota Palangka Raya sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan dan perbankan, kesehatan, transportasi, teknologi informatika harus dibangun lebih maju dan mampu mandiri. Untuk menunjang semua kegiatan tersebut diatas diperlukan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dalam memperlancar arus barang dan jasa , pariwisata, keuangan dan kesehatan.
2. Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan inovasi-inovasi yang tetap berlandaskan pada wisata budaya, wisata alam dan wisata sungai, wisata kuliner khas Palangka Raya Kalimantan Tengah. Untuk kegiatan Wisata Sungai Dinas Perhubungan telah mempersiapkan Sarana dan SDM di Dermaga Tugu Soekarno dan Dermaga Rambang untuk memperlancar arus wisata yang menjadi andalan Kota Palangka Raya dalam mendatangkan wisatawan domestik dan Lokal.



## **b. Misi**

Khusus Bidang Perhubungan adalah menjadi bagian tugas SOPD Dinas Perhubungan yang dalam rangka mewujudkan misi dan sasaran tersebut peningkatan pelayanan dan sarana prasarana perhubungan dilaksanakan dalam rangka arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan prima di terminal maupun dermaga serta pelayanan perijinan LLAJ dan LLASDP;
2. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana Perhubungan;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur;
4. Meningkatkan kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai danau dan penyeberangan.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### **A. Program Penunjang terdiri dari :**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan;

### **B. Program Utama terdiri dari :**

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
9. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas;
10. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;
11. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Fasilitas Perhubungan.

## **3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi/ Kabupaten Kota**

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam dokumen perencanaannya mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi darat;
2. Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia;
3. Peningkatan kualitas operator/penyedia jasa di transportasi darat yang memiliki kualitas prima di dalam manajemen produksi;
5. Peningkatan daya saing pelayanan transportasi darat sehingga mampu berkompetisi dengan moda lainnya;



6. Pertumbuhan pembangunan transportasi darat yang merata dan berkelanjutan;
7. Penciptaan pembangunan transportasi darat yang terintegrasi dengan moda lainnya.

Adapun sasaran Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu :

1. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana transportasi darat agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional
2. Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber daya manusia dan peraturan per-undang-undangan/regulatory reform) di bidang transportasi darat dalam rangka memberikan peluang yang sama se-cara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk ber-peranserta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
3. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa transportasi darat di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, ka-wasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai
4. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa transportasi darat yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat  
Penyusunan Renstra SOPD Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya mengacu kepada Renstra Kementrian Perhubungan dan Renstra Provinsi Kalimantan Tengah dalam penetapan program dan kegiatannya sehingga terciptanya sinkronisasi program dan kegiatan Pemerintah Kota dalam melaksanakan program dan kegiatan Propinsi dan dalam melaksanakan program dan kegiatan kementrian sehingga terciptanya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang terukur dan dapat dilaksanakan. Adapun Program dan kegiatan tersebut adalah :
  1. Program Rehab/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
  2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
  3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
  4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas;
  5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;

Diharapkan dengan adanya sinkronisasi Renstra baik itu Renstra dari Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah akan dapat mempercepat pelaksanaan Pembangunan Nasional dimana Pemerintah Kota Palangka Raya dapat ambil bagian dalam pembangunan nasional meskipun hanya sebagian kecil saja.

Dengan adanya kesamaan persepsi maka diharapkan lebih cepat dalam mencapai tujuan bersama yaitu tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, tersedianya pelayanan angkutan massal, tersedianya pengendalian dan pengamanan lalu lintas diseluruh Indonesia khususnya di kota Palangka Raya.



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sampai dengan saat ini RTRWP di Kalimantan Tengah belum final karena masih belum ada keputusan dari kementrian Kehutanan menyangkut soal RTRWP Propvinsi Kalimantan Tengah. Ada banyak permasalahan menyangkut Tata Ruang, Perkebunan, Kehutanan bahkan jalan dikarenakan terkena jalur hijau yang masih belum dapat diselesaikan karena tidak ada peraturan yang dapat dijadikan acuan untuk memberikan ijin kepada masyarakat dalam hal pemanfaatan hutan dan perkebunan. Dengan adanya RTRWP dapat mempermudah dalam melakukan pembukaan jalan dalam membuka keterisolasian daerah untuk mencapai pengembangan Sistrans (Sistem Transportasi Nasional) yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Palangka Raya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam melaksanakan program dan kegiatan dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya tentunya selain dengan telah dicapainya indikator-indikator yang ada, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya juga menghadapi berbagai kendala-kendala dalam pelaksanaan Program dan kegiatan tersebut baik itu dibidang Lalu Lintas, Bidang Prasarana, Bidang Angkutan dan Sarana, Bidang Pengembangan dan Keselamatan adanya banyak isu – isu strategis yang berkembang dimasyarakat. Adapun Isu-isu strategis dari Dinas Perhubungan Palangka Raya yaitu antara lain :

1. Ketersediaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan :

No	Sarana Prasarana	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Terminal Penumpang	Jumlah Terminal yang ada 2 / dari jumlah kebutuhan 4 Terminal	dan pada kondisi akhir renstra adalah 4/4 Terminal (berfungsi dengan baik)
2	Traffic Light	Traffic Light yang berfungsi adalah 10/15 unit	18/20 unit berfungsi baik
3	Marka Jalan	2/15 lokasi (kondisi baik)	8/20 (kondisi baik)
4	Rambu-rambu	30/150 rambu	90/150

2. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur dalam Perhubungan :

No	Jumlah	Kondisi
1	73 PNS	Sebagian Belum Diklat 40
2	Kendaraan Bus 3 Unit	Rusak Ringan
3	Kendaraan Mobil Operasional 6 Unit	Baik (1 Sesuai Operasional )
4	Speed boat 2 Unit	Rusak
5	Sepeda Motor 11 Unit	3 Kurang, 8 Baik
6	Komputer 10 Unit	Minimal 30 Unit



- a. Kualitas SDM yang masih terbatas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Perhubungan;
  - b. Pengembangan Sistrans ( Sistem Transportasi Nasional) bagi wilayah Kota Palangka Raya;
  - c. Inventarisasi LLAJ, Sungai dan Danau, Parkir, Terminal Dengan hanya kelengkapan data sarana prasarana yang terpantau 15%;
  - d. Adanya indikasi lokasi parkir yang diperjual belikan dari tangan pertama ke tangan kedua;
  - e. Meningkatnya ketidak sadaran sebagian pengelola/ juru parkir untuk tidak membayar setoran retribusi dengan pola alasan-alasan tertentu;
  - f. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dengan dibantu anggaran khusus bagi penanganan operasional perparkiran dalam bentuk kegiatan seperti bimibingan teknis, sosialisasi serta penindakan proses verbal ( BAP) ke Pengadilan Negeri guna dapat memberikan efek jera;
  - g. Penertiban angkutan sungai, belum terpasangnya rambu-rambu sungai dan alur dangkal;
4. Perbandingan Pertumbuhan Kendaraan berbanding terbalik dengan jumlah penumpang umum

NO	URAIAN	SPM	Rasio Capaian Dari Target Tahunnya				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji ( KBWU) yang di uji.	4000	55%	116%	59%	107%	104%
2	Jumlah Arus Angkutan Umum	100%	96%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Angkutan Darat Tersedia dibanding Jumlah Penumpang	40/100	98%	100%	105%	117%	123%

(jumlah angkutan darat semakin banyak dan penumpang menurun)

Disebabkan banyak taksi liar, kurangnya fasilitas terminal yang tidak terawat dan memadai

- 1. Belum optimalnya pengoperasian terminal;
- 2. Penertiban Taksi Liar dan Angkutan Umum Liar;



## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Visi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya yang merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan oleh seluruh operator Dinas Perhubungan dalam kurun waktu 2009 – 2013, merupakan cermin mengenai keadaan internal dan kehandalan inti seluruh organisasi Dinas Perhubungan yang dirumuskan bersama dan merupakan komitmen oleh seluruh anggota organisasi dalam panduan bagi Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya, maka ditetapkan visi sebagai berikut : Visi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya yang merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan oleh seluruh insan Dinas Perhubungan dalam kurun waktu 2013-2018 merupakan cermin mengenai keadaan internal dan kehandalan inti seluruh organisasi Dinas Perhubungan yang dirumuskan bersamadan merupakan komitmen seluruh anggota organisasi dalam panduan bagi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugasnya atau dalam bahasa sederhana merupakan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

#### 5.1 Visi dan Misi SOPD

##### Visi :

Visi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 yaitu

“TERPENUHINYA PRASARANA DAN SARANA SERTA SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG TRANSPORTASI KOTA PALANGKA RAYA YANG MEMADAI DAN BERKUALITAS UNTUK PELAYANAN UMUM MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA “

##### Misi :

1. Membentuk Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan yang profesional sehingga mampu melaksanakan 5 (lima) Citra Manusia Perhubungan dalam rangka tercapainya masyarakat yang tertib berlalu lintas.
2. Mewujudkan sistem transportasi, daerah dan regional yang handal dan berkemampuan tinggi.
3. Meningkatkan kelancaran mobilitas manusia, barang dan jasa guna mendukung pengembangan wilayah.
4. Meningkatkan pelayanan administrasi transportasi, yang cepat, tepat waktu, mudah dan murah.
5. Meningkatkan dan menciptakan sarana dan prasarana transportasi yang efektif dan efisien.





## 5.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SOPD

Dalam upaya untuk melaksanakan visi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 2013-2018 yaitu “Terpenuhinya Prasarana Dan Sarana Serta Sumber Daya Manusia Transportasi, Kota Palangka Raya Yang Memadai Dan Berkualitas Untuk Pelayanan Masyarakat Kota Palangka Raya “Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya mempunyai strategi dan kebijakan dalam upaya mencapai tujuan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

### 1. Tujuan

- a. Menciptakan pelayanan prima di sektor pelayanan publik, jasa perhubungan yang selamat, tertib dan lancar.

### 2. Sasaran :

- a. Terwujudnya pelayanan angkutan;
- b. Terwujudnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- c. Terwujudnya data jaringan sarana dan prasarana perhubungan;
- d. Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpelihara;
- e. Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang berkeselamatan;
- f. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan pengguna lalu lintas;
- g. Terwujudnya aparaturnya yang siap pakai;

## 5.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program – program, dalam mencapai tujuan maka Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya telah menetapkan strategi yang digunakan dalam pencapaian program dan kegiatan yang telah ada sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Sistem transportasi terpadu.
3. Keseimbangan antara permintaan dan penyediaan.
4. Pemberlakuan peraturan – peraturan disertai pengawasan.
5. Tingkatkan data penunjang dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK

Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal mendasar yang harus diperhatikan dalam mencapai visi ke depan, dengan adanya SDM yang handal, tangguh, berintegritas maka akan dapat menyelesaikan masalah Perhubungan yang sangat kompleks dan dinamis.

Untuk penanganan masalah transportasi tetap menjadi skala prioritas adalah pemanfaatan secara maksimal fungsi terminal dan penertiban taxi liar yang sangat marak di Kota Palangka Raya dengan melakukan pengawasan ketat sehingga semua angkutan umum dapat masuk ke terminal yang akan berdampak terhadap meningkatnya PAD, demikian juga



dengan masalah parkir dilakukan pendataan lokasi parkir dan penyuluhan kepada petugas parkir di lapangan sehingga terciptanya kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat pengguna jasa parkir .

Fasilitas sarana dan praarana perhubungan juga menjadi perhatian utama sehingga dengan tersedianya sarana dan parasarana diharapkan akan memperlancar arus lalu lintas dengan mengedepankan perkembangan teknologi informasi yang berkembang dalam membantu fungsi dari Dinas Perhubungan Kota palangka Raya.



**Tujuan, Sasaran, Strategi serta Arah Kebijakan Dinas Perhubungan 2013-2018 sesuai RPJMD**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Menciptakan pelayanan prima di sektor pelayanan publik jasa perhubungan yang selamat, tertib dan lancar	Terwujudnya pelayanan angkutan	Meningkatkan pelayanan angkutan	Pengembangan pelayanan angkutan
	Terwujudnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor
	Terwujudnya data jaringan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan jaringan sarana dan prasarana perhubungan	Peningkatan jaringan sarana dan prasarana perhubungan
	Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpelihara	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan	Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan pengguna lalu lintas	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan lalu lintas	Peningkatan keamanan dan kenyamanan pengguna lalu lintas



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Untuk mencapai sasaran pokok yang telah disebutkan sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya membutuhkan tahapan dan prioritas program dan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

#### **6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN**

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya adalah melanjutkan dan menambah kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan pada rencana kerja tahun-tahun sebelumnya, kegiatan-kegiatan hasil Musrenbang yang tidak tertampung dalam DPA tahun berjalan akan diusulkan lagi tahun berikutnya artinya kegiatan tersebut adalah kegiatan yang langsung bersentuhan dan dinikmati oleh masyarakat antara lain :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
2. Peningkatan Pelayanan Angkutan;
3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pehubungan;
4. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas;
5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;
6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

dengan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat memberi manfaat terhadap masyarakat terhadap kebutuhan jasa perhubungan yang ada di kota Palangka Raya.

#### **6.2 INDIKATOR KINERJA**

1. Indikator Masukan (Input) merupakan indikator yang digunakan untuk menetapkan jumlah sumber daya seperti dana, manusia, informasi dan material yang dibutuhkan.
2. Indikator Keluaran (Out Put) yaitu hasil yang langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dilaksanakan setelah melalui kegiatan.
3. Indikator Hasil (Out Comes) yaitu hasil yang dicapai dan mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah.
4. Indikator Manfaat (Benefit) yaitu hasil yang diperoleh dan merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil dan akan kelihatan setelah beberapa waktu kemudian khususnya dan jangka menengah dan panjang.
5. Indikator Dampak (Impact) yaitu pengaruh yang ditimbulkan secara positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

##### **Indikator Kinerja Dinas Perhubungan**

1. Tersedianya Fasilitas Sesuai Kebutuhan Sumber Daya Manusia pada Bidang Teknis;



- 2. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan;
- 3. Tersedianya pelayanan Angkutan pada wilayah yang tersedia jaringan jalan;
- 4. Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas perlengkapan perhubungan yang berkeselamatan;
- 5. Terpenuhiya ketertiban, keamanan, kelancaran bagi pengguna lalu lintas;
- 6. Tersedianya pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten kota dengan standar minimal;

NOMOR REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET OUTCOME	KETERKAITAN TERHADAP TARGET INDIKATOR PADA RPJMD
1	2	3	4	5
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan			
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	Tersedianya gaji dan tunjangan pegawai	63 ASN	Terwujudnya Gaji dan tunjangan Pegawai
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga		63 ASN	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan		63 ASN	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional		63 ASN	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum		63 ASN	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras		63 ASN	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		63 ASN	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji		63 ASN	
5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas		1 tahun	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS			
5.1.1.02.06	Tunjangan Kinerja	Tunjangan Pegawai	63 ASN	
5.1.1.02.07	Tunjangan Lauk Pauk		63 ASN	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah			
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Intensif Pemungut Retribusi	1 tahun	
5.2	BELANJA LANGSUNG			
1.07.1.07.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Program Pendukung
1.07.1.07.1.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Surat Materai	3042 buah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.07.1.07.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	
1.07.1.07.1.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhiya Honorarium Aparatur	12 bulan	
1.07.1.07.1.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		1 lokasi / tahun	
1.07.1.07.1.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Peralatan Kerja	1 paket	
1.07.1.07.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor		2583 unit	
1.07.1.07.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Alat Tulis kantor	6426 cetak, 615240 lbr	
1.07.1.07.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		432 unit	



1.07 . 1.07.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/majalah	12 bulan	
1.07 . 1.07.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan & minuman tamu & pegawai	1 tahun	
1.07 . 1.07.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Lancarnya tugas dan koordinasi luar daerah	1 tahun	
1.07 . 1.07.1 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Lancarnya tugas dan koordinasi dalam daerah	1 tahun	
1.07 . 1.07.1 . 01 . 22	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Terselenggaranya kegiatan Tahunan Pameran Palangka Fair	1 kegiatan	
1.07 . 1.07.1 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Terwujudnya aparatur yang siap pakai	60 asn tersertifikat /85 asn, Komputer 40 unit	Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan Kebutuhan Fasilitas Sesuai dengan Bidang Teknis
1.07 . 1.07.1 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya sarana perhubungan yang layak dan siap pakai dalam rangka mendukung tugas dan fungsi kerja	3 jenis	Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan Kebutuhan Fasilitas Sesuai dengan Bidang Teknis
1.07 . 1.07.1 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	15 set meubelair, 10 set ac di loket pelayanan, 3 lokasi pelayanan	
1.07 . 1.07.1 . 02 . 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Penunjang Kegiatan	5 komputer, 1 set alat ukur dan survey	
1.07 . 1.07.1 . 02 . 11	Pengadaan Tanah	Tersedianya Tanah Kantor SKPD	1 lokasi	
1.07 . 1.07.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan bermotor operasional	1 tahun	
1.07 . 1.07.1 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 tahun	
1.07 . 1.07.1 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>			
1.07 . 1.07.1 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya disiplin, wibawa dan motivasi kerja Pegawai	60 asn dan 85 ptt	
1.07 . 1.07.1 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			
1.07 . 1.07.1 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya profesionalitas aparatur	63 asn	
1.07 . 1.07.1 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			
1.07 . 1.07.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya laporan Kinerja Bulanan	1 tahun	
1.07 . 1.07.1 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan	Terwujudnya laporan keuangan	1 tahun	
1.07 . 1.07.1 . 06 . 04	Penyusunan program dan rencana kerja	Terwujudnya Laporan Program dan Rencana Kerja Murni & Perubahan	1 tahun	
1.07 . 1.07.1 . 06 . 21	Penyusunan Dokumen dengan Aplikasi SIMPPD/SIPPD SKPD	Terwujudnya Laporan TEPPA, dan Aplikasi SIMPPD,SIPPD SKPD	1 tahun	



1.07 . 1.07.1 . 15	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	Terwujudnya data jaringan sarana dan prasarana perhubungan (Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang berkeselamatan)	Inventarisasi LLAJ, sungai dan danau, parkir, terminal kelengkapan data 75%	Tersedianya jaringan sarana dan prasarana perhubungan
			60 ASN bersertifikat / 85 PNS, Komputer 40 unit	
1.07 . 1.07.1 . 15 . 03	Konsultasi dan Sinkronisasi Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan	Tersedianya jaringan sarana dan prasarana perhubungan Tersedianya SDM dgn kebutuhan fasilitas sesuai dgn bidang Tersedianya SDM dgn kebutuhan fasilitas sesuai dgn bidang Tersedianya jaringan sarana dan prasarana perhubungan Tersedianya jaringan sarana dan prasarana perhubungan Terbangunnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terbangunnya sarana prasarana dermaga di kota P. Raya Tersedianya data sarana dan prasarana perhubungan Terwujudnya Data Pengelolaan Perparkiran	1 tahun	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan yang berkeselamatan
1.07 . 1.07.1 . 15 . 04	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan		6 kegiatan	
1.07 . 1.07.1 . 15 . 04	Pengelolaan Forum LLAJ		1 tahun	
1.07 . 1.07.1 . 15 . 08	Penyusunan Perda Perhubungan		2 perda	
1.07 . 1.07.1 . 15 . 08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		1 tahun	
1.07 . 1.07.1 . 15 . 12	Pembangunan Halte		5 lokasi	
1.07 . 1.07.1 . 15 . 13	Pembangunan Sarana Prasarana Dermaga		6 lokasi	
1.07 . 1.07.1 . 15 . 15	Pendataan Lokasi Parkir		1 tahun	
1.07 . 1.07.1 . 15 . 16	Survey Pengelolaan Parkir		1 tahun	
1.07 . 1.07.1 . 17	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	Terwujudnya pelayanan angkutan (Meningkatnya Pelayanan Angkutan)	300 Angkot Beroperasi /430 Kebutuhan Trayek Angkot	Tersedianya pelayanan angkutan pada wilayah yang tersedia jaringan jalan (Rasio pelayanan Angkutan pada wilayah yang tersedia jaringan jalan)
1.07 . 1.07.1 . 17 . 06	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	Terpeliharanya kemanan dan kenyamanan penumpang Terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa lalin angkutan darat Tertib dan lancarnya pengguna jasa Terminal Tertib dan lancarnya pengguna jasa Angkutan Sungai Terlaksananya penertiban Parkir Tersedianya kebutuhan fasilitas sesuai kegiatan	2 Terminal	Peningkatan keamanan dan kenyamanan pengguna lalu lintas
1.07 . 1.07.1 . 17 . 18	Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		1 tahun	
1.07 . 1.07.1 . 17 . 19	Penertiban Terminal dan PKB		1 tahun	
1.07 . 1.07.1 . 17 . 20	Penertiban Angkutan Sungai		1 tahun	
1.07 . 1.07.1 . 17 . 21	Penertiban Parkir		1 tahun	
1.07 . 1.07.1 . 17 . 22	Pengelolaan Pos Pengawasan Angkutan		2 lokasi	
1.07 . 1.07.1 . 17 . 23	Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kegiatan Nasional dan Hari Besar	Termonitornya pengawasan & pengaturan arus lalin pd keg. hari besar keagamaan	2 kegiatan hari besar	





1.07 . 1.07.1 . 17 . 24	Pengawasan Parkir Khusus Kegiatan Nasional dan Hari Besar	Terselenggaranya pengawasan penataan perparkiran pada kegiatan Nasional dan Hari Besar	2 kegiatan hari besar	
1.07 . 1.07.1 . 17 . 25	Pengawasan dan Pengendalian Parkir Tepi Jalan Umum	Terselenggaranya pengawasan & monitoring penataan perparkiran	1 tahun	
1.07 . 1.07.1 . 17 . 26	Pengawasan dan Pengendalian Perijinan Angkutan Orang dan Barang	Pengendalian Angkutan	1 tahun	
1.07 . 1.07.1 . 19	<b>Program Peningkatan dan Pengamanan lalu Lintas</b>	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan pengguna lalu lintas (Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang berkeselamatan)	200 unit kondisi baik / 300 kebutuhan yang ada	Terpenuhiya ketertiban keamanan, kelancaran bagi pengguna lalu lintas (Rasio Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan (Moda Angkutan Darat))
1.07 . 1.07.1 . 19 . 01	Pengadaan Rambu Lalu Lintas	Terpenuhiya Rambu-rambu lalin pd daerah yg dianggap rawan kecelakaan lalin	50 Lokasi	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan yang berkeselamatan
1.07 . 1.07.1 . 19 . 02	Pengadaan Marka Jalan	Terbentuknya marka baru	3 Lokasi	
1.07 . 1.07.1 . 19 . 01	Pengadaan Cermin Tikungan	Terpenuhiya Rambu-rambu lalin pd daerah yg dianggap rawan kecelakaan lalin	10 Lokasi	
1.07 . 1.07.1 . 19 . 06	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan (DAK)	Tersedianya fasilitas keselamatan jalan	1 Lokasi	
1.07 . 1.07.1 . 19 . 07	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan (DAU)	Tersedianya fasilitas keselamatan jalan	1 lokasi TL, 1 Lokasi Pelikan Cross, 3 Lokasi Warning Light	
1.07 . 1.07.1 . 20	<b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan bermotor</b>	Terwujudnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor (Meningkatnya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor)	24.845Kir	Jumlah uji KIR Angkutan umum (uji) - (Prosentase Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Wajib Uji )
1.07 . 1.07.1 . 20 . 01	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	Pengembangan bangunan balai pengujian kendaraan	1 Gedung	Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor
1.07 . 1.07.1 . 20 . 07	Pengadaan Tanda Samping Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya pengujian kendaraan bermotor dengan standar minimal	8000 pasang	
1.07 . 1.07.1 . 20 . 08	Pengadaan Plat Uji	Tersedianya pengujian kendaraan bermotor dengan standar minimal	8000 pasang	
1.07 . 1.07.1 . 20 . 09	Pengadaan Buku Uji	Tersedianya pengujian kendaraan bermotor dengan standar minimal	8000 unit	
1.07 . 1.07.1 . 20 . 10	Pengadaan Sarana Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengembangan fasilitas pengujian kendaraan bermotor	1 set kelengkapan petugas dan aplikasi	



1.07 . 1.07.1 . 21	<b>Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpelihara (Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang berkeselamatan)	200 unit kondisi baik / 300 kebutuhan yang ada	Terpeliharanya sarana dan prasana fasilitas perhubungan - Rasio Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan (Moda Angkutan Darat)
1.07 . 1.07.1 . 21 . 01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal	Terpeliharanya Terminal	Dermaga 8/16, Terminal 4/5, TL 18/20, Marka 8/20, Lokasi, Rambu-Rambu 90/150 2 Terminal	Terpeliharanya sarana dan prasana fasilitas perhubungan - Rasio Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas Keselamatan Sungai (Moda Angkutan Sungai & Danau)
1.07 . 1.07.1 . 21 . 02	Pengawasan Sarana Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya perlengkapan jalan	1 Tahun	Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
1.07 . 1.07.1 . 21 . 04	Pemeliharaan Sarana/Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Standar minimal alat uji	9 Alat Pengujian	
1.07 . 1.07.1 . 21 . 05	Pemeliharaan Mesin Genset Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya peralatan- peralatan alat uji	1 tahun	
1.07 . 1.07.1 . 21 . 06	Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga (Rehab Berat)	Terpeliharanya Dermaga Wisata Kota Palangka Raya	5 Lokasi	
1.07 . 1.07.1 . 21 . 07	Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga (Rehab Kecil)	Terpeliharanya Dermaga	2 Lokasi	
1.07 . 1.07.1 . 21 . 08	Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light (Rehab Berat)	Tepeliharanya Trffic Light	13 Traffic Light, 3 Warning Light	
1.07 . 1.07.1 . 21 . 09	Pembersihan Alur Sungai	Perencanaan perbaikan dan pengaturan alur sungai	10%	

6.3 Kelompok Sasaran

Pihak yang menerima manfaat langsung dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya adalah masyarakat pengguna jasa Perhubungan. itu sendiri dimana manfaat itu sendiri dapat dilihat dari tujuan dan indikator program kegiatan yang ada pada tabel pendanaan indikatif dibawah ini.

- 1. Terwujudnya aparatur yang siap pakai;
- 2. Terwujudnya data jaringan sarana dan prasarana perhubungan;
- 3. Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpelihara;
- 4. Terwujudnya pelayanan angkutan;
- 5. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan pengguna lalu lintas;
- 6. Terwujudnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor;



#### 6.4 Pendanaan Indikatif

Dasar dalam membuat pendanaan indikatif tentunya mengacu pada Rancangan awal RPJMD yaitu pada isu-isu strategis, visi, misi, strategi dan arah kebijakan setelah itu melakukan perumusan target berdasarkan Output dan Outcome. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya pada tabel dibawah ini :



BAB VI

INDIKATOR SOPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1 Indikator Kinerja SOPD

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya yang tercantum dalam RPJMD 2013-2018 serta SK IKU Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya terlampir, yaitu :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2013 - 2018

Nama SKPD : Dinas Perhubungan Kota P. Raya

Nama Kabupaten /Kota : Palangka Raya

Tugas dan Fungsi : Terwujudnya Transportasi yang Efektif, Aman, Tertib dan Lancar, sebagai Unsur Penunjang, Penggerak dan Pendorong Pembangunan Kota Palangka Raya

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Pelayanan Angkutan	1. Rasio pelayanan Angkutan pada wilayah yang tersedia jaringan jalan	Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya	RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018	ASPEK PELAYANAN UMUM FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB
2. Meningkatnya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	1. Prosentase Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Wajib Uji			
3. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang berkeselamatan	1. Rasio Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan (Moda Angkutan Darat) 2. Rasio Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas Keselamatan Sungai (Moda Angkutan Sungai & Danau)			

Dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kota Palangka Raya khususnya di bidang Perhubungan , Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya telah menetapkan indikator dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimana dengan adanya indikator kinerja maka akan dapat terlihat capaian pelaksanaan program dan kegiatan



yang berjalan dengan mengedepankan Standar Pelayanan Minimal (SPM). RPJM sangat penting dalam rangka mencapai sasaran jangka menengah dari SOPD dalam rangka memenuhi visi dan misi Walikota. Dengan adanya indikator akan memudahkan SOPD dalam melihat sejauh mana perkembangan pembangunan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang sudah direncanakan, untuk itu Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya telah menetapkan rencana indikator SOPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya mempunyai 2 ( dua) urusan yaitu bidang Perhubungan. Dibawah ini termuat RPJM Kota Palangka Raya Urusan Perhubungan kondisi tahun 2012,2013 dan Target Kinerja Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini :





## PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2013–2018 merupakan suatu dokumen perencanaan teknis strategis yang merupakan uraian dari Rancangan Rencana Strategis pelaksanaan arah dan kebijakan serta sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan umum dan strategis prioritas Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, maka penjabaran Renstra secara operasional dituangkan dalam arah dan kebijakan umum Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.

Evaluasi dan penyusunan kinerja baru ditentukan formatnya, variabel dan kriteria pengisian akan diisi pada akhir Tahun Anggaran.

Diharapkan Rencana Strategis ini akan memotivasi keberhasilan pencapaian visi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya.

Palangka Raya,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PALANGKA RAYA,

**Drs. ELDY, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19621024 198603 1 018



**Tabel 4.1 Reviu dan Proyeksi Pencapaian SPM pada Renstra 2014 – 2018**

**URUSAN : PERHUBUNGAN**

7. Perhubungan	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2013	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Kondisi Akhir
7.1	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (uji)	12.256	18.860	19.600	20.256	23.256	24.845	24.845
7.2	Rasio Ijin Trayek(%)	0,187	0,184	0,176	0,169	0,162	0,156	0,156
7.3	Pemasangan Rambu-Rambu (%)	0,114	0,160	0,210	0,264	0,320	0,377	0,377
7.4	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Orang)	59.250	59.350	60.156	61.160	59.250	63.130	63.130
7.5	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) (Menit)	30	30	30	30	30	30	30

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun 2012	Kondisi Tahun 2013	Target Kinerja/ Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Angkutan Darat dibanding Jumlah Penumpang	%	0,66	0,69	40	40	40	40	40
2	Jumlah Arus Angkutan Umum	Orang	59.164	59.250	59.350	60.156	61.160	59.250	63.130
3	Rasio Ijin Trayek	Buah	430	430	430	430	430	430	430
4	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang di uji	Buah	10.388	10.400	11.000	11.250	12.150	12.350	13.135
5	Jumlah Dermaga/ Terminal	Buah	13 / 4	16/4	16/4	16/4	17/4	17/4	18/4





No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Program Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal	capaian program kinerja					Kondisi Akhir	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
					2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Terwujudnya pelayanan angkutan	Meningkatkan pelayanan angkutan	Pengembangan pelayanan angkutan	Tersedianya pelayanan Angkutan pada wilayah yang tersedia jaringan jalan	120 /206 Bus 178/430 Angkot	120 /206 Bus 178/430 Angkot	120 /206 Bus 200/430 Angkot	120 /206 Bus 250/430 Angkot	120 /206 Bus 280/430 Angkot	120 /206 Bus 290/430 Angkot	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		
2	Terwujudnya Pelayanan pengujian Kendaraan bermotor	Meningkatkan Pelayanan pengujian Kendaraan bermotor	Peningkatan Pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Tersedianya pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten kota dengan standar minimal	12.256 Kir	18.860 kir	19.237 Kir	19.614 kir	19.992 Kir	20.369 Kir	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		
3	Terwujudnya jaringan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan jaringan sarana dan prasarana perhubungan	Peningkatan data jaringan sarana dan prasarana perhubungan	Tersedianya Data jaringan sarana dan prasarana perhubungan (Persentase Inventarisasi LLAJ,Sungai dan Danau, Parkir, Terminal)	15	25	45	55	65	65	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		
4	Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpelihara	Meningkatkan Jaringan sarana dan Prasarana perhubungan	Peningkatan data jaringan sarana dan prasarana perhubungan	Tersedianya Fasilitas Sesuai dengan Bidang Teknis Perhubungan : - Moda Angkutan Darat (Unit) - Moda Angkutan Sungai dan Danau (Unit)	20/2, 2/16	20/2, 2/16	21/4, 4/16	22/5, 8/16	22/5, 10/16	22/4, 12/12	Program Rehab/Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan		
			Terpeliharanya Sarana dan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Traffic	10/15	10/15	12/15	12/15	15/15	15/15			



			<i>Prasarana Perhubungan</i>	<i>Light (Unit)</i>								
5	<i>Terwujudnya keamanan dan kenyamanan pengguna lalu lintas</i>	<i>Meningkatkan Pengendalian &amp; pengawasan lalu lintas</i>	<i>Peningkatan keamanan dan kenyamanan pengguna lalu lintas</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Marka (Lokasi)</i></li> <li>- <i>Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Rambu-Rambu (Unit)</i></li> </ul>	2/15, 30/150	2/15, 40/150	4/15, 50/150	6/15, 60/150	8/15, 70/150	10/15, 80/150	<i>Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas</i>	



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA

*TAHUN 2013 – 2018*



**DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA**

Jl. Mahir Mahar Lingkar Luar  
Komp. Terminal AKAP W. A. GARA Palangka Raya  
Telp.(Fax) (0536) 3221219 email/surel : [dishub@palangkaraya.go.id](mailto:dishub@palangkaraya.go.id)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia – Nya, telah disusun dan dapat diselesaikan **Rencana Strategis (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALANGKA RAYA 2013-2018**. RENSTRA ini disusun dengan maksud ingin menggambarkan kesinambungan pembangunan daerah dan sebagai landasan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menentukan arah pembangunan bidang perhubungan ke depan. Renstra ini juga disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi pemangku kepentingan di pusat dan daerah, partisipasi seluruh pejabat Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, dengan memperhatikan arah reformasi perencanaan dan penganggaran yang telah ditentukan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 2013-2018 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya.

Palangka Raya,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,  
KOTA PALANGKA RAYA

**Drs. ELDY, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19621024 198603 1 018